

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERAN KOMITE SEKOLAH SMK NEGERI 5 SAMARINDA (Realisasi Kemendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah)

A. Amirunsyah Awie¹, Adam Idris², Mass'ad Hatuwe³

Abstract

The existence of the school committee as been arranged in National Education Minister Decision Number 044/U/2002 formed in order to organize society's aspiration, to develop society's role, and to create democratics situation to implement the education so that educational high quality can be reached. The development of educational high quality at school need to be supported by headmasters' managerial ability. School must be progressed every year. Therefore, good relationship among teachers must be created so that there will be a more condusive and cozier working climate and condition. Thus, the arrangement of physical appearance and school management must be built so that school can be an educational environment which can grow creativity and discipline to increase educational high quality.pendidikan.

Keyword : *Implementation, policy, school committees*

Abstrak

Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung oleh kemampuan manajerial kepala sekolah. Sekolah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun. Karena itu hubungan baik antara guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan kreativitas, disiplin dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Komite Sekolah*

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman

³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Salah satu contoh penyelenggaraan pendidikan yang melaksanakan Komite Sekolah dapat diamati di Kota Samarinda. Dinas Pendidikan Kota Samarinda berupaya untuk mengubah agar tiap sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah melalui Komite Sekolah. Dimana fasilitas sarana dan prasarana yang baik dapat menunjang dalam kegiatan belajar mengajar di luar sekolah sehingga diharapkan tiap murid dapat memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan dari kegiatan proses belajar mengajar di luar sekolah.

Melalui Komite sekolah masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan monitoring program pendidikan melalui dewan sekolah dan komite sekolah. Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan itu merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Peran komite sekolah mengarah pada empat peran utama komite sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator.

Dengan demikian, keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi MBS dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Selama ini di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Timur pada khususnya telah diupayakan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, namun keterlibatan tersebut masih sebatas dalam bentuk dukungan dana untuk penyelenggaraan pendidikan atau sekedar untuk membantu serta menyediakan fasilitas belajar anak di rumah. Sementara itu, keterlibatan orangtua siswa dalam pengambilan keputusan tentang program-program sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, evaluasi dan akuntabilitas program belum dapat terealisasikan.

Rendahnya peran orang tua siswa dan masyarakat mengenai arti penting keterlibatan mereka dalam pendidikan anak, rendahnya tingkat pendidikan orangtua, faktor budaya dan sikap orangtua yang cenderung mempercayakan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah, diduga akan menjadi kendala utama dalam upaya pelibatan orangtua dalam pendidikan anaknya di sekolah.

Sikap sebagian administrator sekolah dan guru, dan sikap iklim kerja yang tertutup juga menyebabkan rendahnya keterlibatan orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Konsep Implementasi Kebijakan

Udoji dalam Wahab (2005:59) dengan tegas mengatakan bahwa : *“the execution of policies as important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints/file jackets unless they are implemented”*. (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Selanjutnya Jones (dalam Widodo, 2001) merumuskan batasan implementasi sebagai *“ a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done”*. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang akan dikerjakan. Apa yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut tidak kurang dari suatu kebijaksanaan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama : merumuskan tindakan yang akan dilakukan, Kedua : melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle dalam Samodra (1994:22-24): *“Implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”*. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan, konteks kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat.

Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai peranan di luar kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu program maka model kesesuaian D.C Korten dalam Tjokrowinoto (1996:136) merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program/kebijaksanaan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan

Salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan MBS adalah adanya peningkatan partisipasi orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut dapat terealisasi apabila antara sekolah dengan masyarakat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik

dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) melakukan dialog untuk merumuskan tujuan sekolah; (2) menciptakan hubungan yang baik antar partisipan; (3) harus mampu belajar dari pengalaman; (4) menjalin hubungan dengan lingkungan di luar sekolah; (5) menerapkan pendekatan belajar tuntas bagi siswa; dan (6) melibatkan semua partisipan dalam pengambilan keputusan.

Komite Sekolah

Komite sekolah sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 044/U/2002 disebutkan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan para sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan jalur luar sekolah.

Interpretasi Data

Untuk data penelitian akan diuraikan berdasarkan fokus dari variabel penelitian. Data penelitian sifatnya hanya memaparkan, menggambarkan dan mendeskripsikan data hasil penelitian, maka dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan data apa adanya dengan yang ada di lapangan yaitu mengenai "Implementasi Kebijakan Peran Komite Sekolah di SMK Negeri 5 Samarinda sebagai **Realisasi Kemendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.**

Implementasi kebijakan sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan kebijakan yang diperlukan sebagai sebuah solusi yang bersifat menyeluruh yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan program pendidikan. Secara umum, implementasi kebijakan Peran Komite Sekolah merupakan suatu proses untuk mencapai suatu sasaran program dalam suatu organisasi sekolah melalui tahapan-tahapan dan program kegiatan tersebut telah tersusun serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan Peran Komite Sekolah dapat dilihat dari empat dimensi dalam pelaksanaannya, yaitu : (1). Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur organisasi. Berikut hasil penelitian akan diuraikan sebaga berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima dan informasi itu dapat dimengerti oleh penerima. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan serta merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Fokus dari variabel komunikasi meliputi transparansi dan kejelasan (manfaat dan tujuan).

a. *Transparansi*

Transparansi yang dimaksud adalah adanya keterbukaan dari komite sekolah mengenai perannya terkait dengan implementasi kebijakan pada SMK Negeri 5 Samarinda

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa informan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komite sekolah telah dikomunikasikan dengan baik. Implementasi kebijakan yang dimaksud tetap mengacu pada Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

b. *Kejelasan*

Mengenai kejelasan (manfaat dan tujuan), ini berkaitan langsung dengan sasaran atau tujuan implementasi kebijakan peran komite sekolah. Terkait dengan masalah komite sekolah, peran orang tua siswa dalam pelaksanaan Komite Sekolah di SMK Negeri 5 Samarinda.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa informan menunjukkan bahwa kejelasan mengenai kebijakan telah Peran Komite Sekolah sebagai Realisasi dari Kemendiknas Nomor 044/U/2002 telah dikomunikasikan dengan baik, sehingga akan mempengaruhi proses pengimplementasian suatu kebijakan tertentu.

2. *Sumber Daya*

Berkaitan dengan sumber daya dalam implementasi kebijakan peran komite sekolah adalah berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan tentang sumber daya yang ada, seperti jumlah manusia sebagai pelaksananya, finansial sebagai pendanaannya, fisik sebagai penampilan (*performance*) yakni kekuatan, pengetahuan, keterampilan dari orang-orang yang melaksanakan, teknologi yang digunakan. Fokus dari variabel sumber daya adalah kemampuan dan peran komite sekolah rangka meningkatkan kualitas sekolah dalam melaksanakan program pendidikan.

a. *Kemampuan anggota komite sekolah*

Kemampuan anggota komite sekolah yang dimaksud adalah kemampuan dalam melaksanakan arah dan kebijakan komite sekolah. Kemampuan anggota komite sekolah dapat dilihat dari keaktifan mereka dan sumbang sarannya dalam dalam forum ataupun rapat sekolah.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dapat disimpulkan bahwa peran sumber daya manusia yang masuk susunan kepengurusan komite sekolah mampu menentukan arah kebijakan serta dapat memfasilitasi sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang dapat menunjang kegiatan sekolah serta mampu memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah dan program pendidikan serta rencana anggaran pendidikan dan belaja sekolah.

b. Jumlah Pengurus Komite Sekolah

Jumlah pengurus komite sekolah yang dimaksud adalah banyaknya orang yang terlibat dalam kepengurusan komite sekolah. Kepengurusan komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Dalam AD dan ART telah diatur bahwa Pengurus komite sekolah SMK N 5 Samarinda terdiri dari unsur tokoh masyarakat, wali/orang tua siswa, pengusaha, tokoh pendidikan, dan guru di sekolah tersebut. Adapun jumlah pengurus komite sekolah sebanyak 21 orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan dibantu oleh komisi-komisi.

Dari beberapa pendapat hasil observasi disimpulkan bahwa dengan jumlah kepengurusan komite sekolah yang ada mampu untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diprogramkan oleh komite sekolah. Pemahaman beberapa anggota mengenai tugas dan peran komite sekolah di SMK 5 Samarinda sudah sesuai dengan SK Mendiknas RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah di SMK N 5 Samarinda berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung.

3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud dalam implementasi kebijakan peran komite sekolah merupakan karakteristik dari orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan komite sekolah, seperti komitmen mereka, konsistensi secara terus menerus, jujur dalam bekerja (ikhlas) serta sesuai ketentuan dalam kebijaksanaan pemerintah terkait dengan peran komite sekolah dalam upaya meningkatkan program pendidikan di sekolah. Adapun fokus yang diteliti dari variabel disposisi adalah Konsisten dan jujur dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya sebagai pengurus komite sekolah.

a. Konsisten

Konsisten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu karakteristik yang harus dilakukan oleh kepengurusan komite sekolah dalam menjalankan perannya. Dalam dimensi ini unsur konsistensi pengurus sangat menentukan implementasi kebijakan terkait dengan peran komite sekolah.

b. Jujur

Dalam rangka pelaksanaan kepengurusan komite sekolah harus menunjukkan sikap profesional dan dapat mewartakan serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang dimaksud dalam implementasi kebijakan peran komite sekolah tersebut tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab

mengenai program kerja dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Adapun yang menjadi fokus penelitian untuk variabel struktur organisasi adalah (SOP) dan pengawasan.

a. Standar dan Prosedur

Standar dan Prosedur adalah merupakan suatu standar baku yang harus dilaksanakan oleh pengurus yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 mengenai peran komite sekolah.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan kemampuan manajemen yang komprehensif, instrumen kebijakan yang diperlukan antara lain: standar fisik, standar SDM dan standar pelayanan, terintegrasi, dan dapat merespon masalah yang timbul, dan instrumen *policy monitoring*.

b. Pengawasan

Pengawasan dalam suatu organisasi merupakan suatu keharusan. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan, untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dari beberapa pendapat informan terkait dengan pengawasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu upaya agar yang telah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan suatu program kerja, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan berkaitan dengan kebijakan.

Untuk memudahkan dalam memahami kajian kebijakan terkait implementasi kebijakan komite sekolah, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Instrumen kebijakan** : adalah suatu pedoman/standar tentang aspek legal yang menetapkan stakeholder yang terlibat, tanggung jawabnya, kontribusinya dan akuntabilitasnya dalam bentuk produk hukum, berupa standar, prosedur tetap pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan.
2. **Isu kebijakan** : permasalahan kebijakan yang diidentifikasi sebagai masalah dalam mencapai tujuan kebijakan
3. **Policy gap / kesenjangan kebijakan** : munculnya masalah kebijakan, sebagai akibat tidak ada/tidak lengkapnya instrumen kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi kebijakan
4. **Konflik kebijakan** : munculnya masalah kebijakan sebagai akibat tidak sinkronnya kebijakan yang ada baik dalam lingkup internal dan eksternal maupun di tingkat implementasi
5. **Alternatif kebijakan** : pilihan-pilihan kebijakan untuk dipertimbangkan sebagai rekomendasi kebijakan

6. *Hospital bylaw* : ketentuan penyelenggaraan program pendidikan di satuan pendidikan (misalnya dalam bentuk keputusan Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan)

Pembahasan

Pembentukan Komite Sekolah merupakan tuntutan yang lahir seiring dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi untuk lebih meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat. Tuntutan tersebut tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Butir-butir ketentuan yang penting di dalam Kepmendiknas tersebut akhirnya juga diakomodasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi kebijakan peran komite sekolah sebagai realisasi dari Kepmendiknas nomor 044/U/2002 dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah secara maksimal dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dan daerah, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui kegiatan Pembinaan Komite Sekolah, telah meluncurkan beberapa program dan kegiatan dengan tujuan agar Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dengan dukungan dari keempat variabel tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

Dari hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan pada bab di atas, kepengurusan komite sekolah telah mengikuti aturan dengan jumlah anggota minimum 11 orang sedang yang lain jumlah anggotanya lebih besar, dengan anggota sampai 20 orang, dan untuk struktur organisasi seperti disarankan. Semua sekolah diwakili oleh paling sedikit satu orang guru dalam komite sekolah. Paling banyak ada tiga orang wanita terwakili dalam komite sekolah, meskipun demikian bendaharawan adalah wanita.

Pengetahuan mengenai pendidikan, yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3, kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi pengurus. Pengurus dipilih karena keterampilan-keterampilan (dilihat dari aspek sumber daya) mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki (komunikasi). Sebagian besar anggota komite sekolah mempunyai minat menjadi anggota komite sekolah dalam hal ini anggota komite sekolah memiliki komitmen dan kejujuran (disposisi). Anggota komite sekolah pada umumnya dipilih melalui musyawarah dan tidak melalui pemilihan dalam suatu wadah (organisasi). Beberapa orang yang dulunya adalah anggota BP3 diangkat kembali menjadi anggota komite sekolah dan tugasnya diperluas. Kepengurusan komite sekolah

tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan dari kepala sekolah. Pertemuan-pertemuan formal dilakukan secara regular misalnya setiap satu bulan, satu semester, dan satu tahun. Komite sekolah sering mereka diundang oleh kepala sekolah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan rencana pengembangan sekolah (RAPBS), tetapi mereka dapat diundang oleh kepala sekolah maupun oleh ketua komite untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kalender sekolah. Program-program yang dikembangkan dalam pertemuan-pertemuan ini menunjukkan kecenderungan terfokus pada perbaikan fisik sekolah. Aktivitas peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya nampak tidak mengacu pada isu-isu penting belajar mengajar. Walaupun demikian, dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah.

Kebijakan optimalisasi peran dan fungsi Komite Sekolah merupakan langkah kebijakan yang memiliki peranan dan implikasi penting dalam memenuhi kebutuhan terwujudnya program pendidikan di sekolah yang sesuai dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dihasilkan alternatif-alternatif strategi beserta aktivitas pendekatannya, sehingga peran komite sekolah di SMK Negeri 5 Samarinda semakin maksimal yang meliputi:

1. Penyusunan regulasi tentang peran Komite Sekolah yang mengakomodir :
 - a. Kebutuhan akan adanya jaminan dan perlindungan hak dan kewajiban Komite sekolah;
 - b. Sekolah dalam melaksanakan TUPOKSI-nya sesuai dengan AD/ART yang ditetapkan;
 - c. Kewenangan dan urusan dalam penanganan dan pengelolaan keuangan;
 - d. Kewenangan dalam peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di Sekolah; dan
 - e. Formulasi standar AD/ART Komite sekolah.
2. Redefinisi Kemitraan antara Komite Sekolah dan Sekolah
Perumusan bentuk kemitraan Komite Sekolah dengan Sekolah yang diusulkan adalah berbentuk kerjasama Komite Sekolah dan Sekolah dengan kesetaraan hanya pada sisi tugas dan fungsinya sesuai yang disepakati dalam regulasi/peraturan yang mengikat, sedangkan dari sisi kedudukan kerjasama tetap pihak Sekolah (Kepala Sekolah) berada pada posisi pemimpin.
3. Penataan Kelembagaan Komite Sekolah
Model kelembagaan Komite Sekolah yang diusulkan adalah suatu bentuk kelembagaan fungsional yang lebih menitik beratkan pada pelayanan fungsi administrasi dan keuangan, mutu pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta sesuai dengan program Sekolah yang telah disusun dan ditetapkan.

4. Kebijakan Rekrutmen Anggota Komite Sekolah

Penetapan kriteria calon anggota Komite Sekolah, antara lain :

- a. Memiliki kepeduliandan dadikasi yang tinggi akan keberlangsungan program dan kemajuan sekolah;
- b. Alumni atau orang tua murid yang memiliki ikatan premodial terhadap sekolah, memiliki *track record* yang baik dan aktif serta *sense belonging* yang tinggi;
- c. Memiliki waktu yang cukup;
- d. Memiliki kapabilitas/kemampuan yang memadai; dan
- e. Mampu bekerja sama dan mengerti akan *Tim Building*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan peran komite sekolah sebagai realisasi dari Kepmendinas nomor 044/U/2002 telah dikomunikasikan dengan baik kepada pengurus komite sekolah dengan tujuan peningkatan peran komite sekolah dalam rangka meningkatkan program pendidikan di satuan pendidikan. Sedang yang terkait dengan sumber daya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan tentang sumber daya yang tersedia, seperti jumlah manusia sebagai pelaksananya, finansial sebagai pendanaannya, fisik sebagai penampilan (*performance*) yakni kekuatan, pengetahuan, keterampilan dari orang-orang yang melaksanakan, teknologi yang digunakan ini terlaksana dengan baik. Adapun kebijakan berkaitan dengan disposisi dalam meningkatkan peran komite sekolah seperti komitmen mereka, konsistensi secara terus menerus, jujur dalam bekerja (ikhlas) terlaksana dengan baik. Sedangkan yang berkaitan dengan struktur organisasi. adanya pembagian yang jelas dalam organisasi tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab mengenai pelaksanaan program komite sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
2. Pelaksanaan program kerja komite sekolah di SMK N 5 Samarinda telah berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan adanya pemahaman pengurus komite sekolah dan kepala sekolah terhadap tugas dan peran komite sekolah penyelenggaraan program kerja sekolah.
3. Kendala dalam Pelaksanaan program komite sekolah di SMK N 5 Samarinda adalah: (a) faktor kesibukkan pengurus komite sekolah, dan (b) jadwal/waktu pertemuan yang terbatas, disebabkan pengurus komite sekolah melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Saran-Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan masukan-masukan agar mendorong peningkatan pelayanan. Adapun masukan-masukan berupa saran adalah sebagai berikut :

1. Pihak sekolah hendaknya lebih proaktif dalam memberdayakan dan melibatkan pengurus komite sekolah dalam berbagai pengambilan kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan program sekolah yang bersifat strategis sehingga peningkatan kualitas sekolah dapat dicapai.
2. Pihak sekolah hendaknya memiliki dan melaksanakan mekanisme kontrol mengenai kinerja komite sekolah secara berkesinambungan, sehingga bila terjadi hal-hal yang kurang efektif pada proses kerja komite sekolah dalam segera diperbaiki.
3. Diharapkan adanya masukan dari unsur masyarakat atau *stakeholders* yang dapat menjadi sumbangsih atau masukan dalam memperbaiki implementasi kebijakan, khususnya dalam menjalankan strategi pembangunan di bidang pendidikan.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002*, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Depdiknas Jakarta.
- Anonim, *Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional*. (2002). Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Depdiknas Jakarta.
- Anonim, *UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdiknas. Jakarta.
- Anonim, 2009, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP RSBI*, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta
- Arni, Muhammad, 2001, *Komunikasi Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dunn, William, N. 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, PT Hanindita Graya Widya, Yogyakarta.
- Edward III, George.C, 1980, *Implementation Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Effendi, Sofyan, 2000, *Kuliah Umum MAP UNDIP Angkatan I*, Semarang.
- Gama, Judistira K., 2001, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung, Primaco Akademika.
- Handoko, Hani T., 2000, *Managemen*, Edisi II,(terjemahan), BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P., 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Cetakan Keenam, edisi revisi, Haji masagung, Jakarta.

- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Keban, T Yarimias, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media Yogyakarta.
- Manullang, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen. Edisi Revisi*, Sinar Harapan. Medan
- Masoed, Mochtar, 2007, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan Haberman, 2002, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moelong, J. Lexi, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Nasution, 2003, *Metode Research (penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, (et al), 2003, *Penelitian Terapan*, Gajahmada University Press. Jogjakarta.
- Rislina, 2011, *Implementasi Kebijakan manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Kuaro Kabupaten Paser*, Tesis Yang Tidak Dipublikasikan
- Samodra Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian, Sondang P., 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kesembilan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syaukani, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, edisi revisi, LP3ES, Jakarta.
- Toha, M., 2002, *Perilaku Organisasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tohir, 2012, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Radiologi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur*. Tesis Yang Tidak Dipublikasikan.
- Wahab, Sholichin, Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*
-----, 2005, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wintoro, Agus, 2011, *Implementasi kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP Negeri 2 Tanah Grogot*, Tesis Yang Tidak Dipublikasikan.